

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN
OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014)**

Cyndy Claudia Puspa Indah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan dan konsekuensi yuridisnya dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satunya penetapan status tersangka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan yaitu penambahan objek Praperadilan yang terdiri dari: sah atau tidaknya (penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan) dan konsekuensi yuridis dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satunya penetapan status tersangka yakni memberikan konsekuensi penegakkan hak konstitusional warga negara, kedua konsekuensi terhadap implementasi putusan tersebut di tengah masyarakat, yakni akan terdapat banyak kasus terkait dengan penetapan tersangka yang akan diajukan dalam proses praperadilan dan yang ketiga konsekuensi terhadap aparaturnegak hukum yakni kesulitan bagi penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kemudian ketidaktahuan aparaturnegak hukum dalam menerapkan norma putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Perluasan Objek Praperadilan, dan Konsekuensi

THE DETERMINATION OF A SUSPECTED STATUS FOR THE PATRIAL POST DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT

**(Study The Decision of Constitutional Court Number 21/PUU-
XII/2014)**

Cyndy Claudia Puspa Indah

Abstract

This study aims to determine the construction of the Indonesian criminal procedure law against pretrial after the Constitutional Court ruling regarding the expansion of pretrial objects and the juridical consequences of the expansion of pretrial objects after the Constitutional Court decision Number 21 / PUU-XII / 2014, one of which is the status of suspects. The results of this study indicate that the construction of the Indonesian criminal procedure against pretrial after the Constitutional Court ruling related to the expansion of pretrial objects, namely the addition of pretrial objects consisting of: legal or not (the determination of suspects, searches and seizures) and juridical consequences of the expansion of pretrial objects after the Constitutional Court ruling Number 21 / PUU-XII / 2014, one of which is the determination of the status of suspects, which is a consequence of enforcing citizens' constitutional rights, the two consequences for the implementation of the decision in the community, namely there will be many cases related to the determination of suspects who will be submitted in the pretrial process and those who the third consequence of law enforcement officials is the difficulty for investigators in setting someone as a suspect, then the ignorance of law enforcement officials in applying the norms of the Constitutional Court's ruling on the determination of suspects as pre-trial objects justice.

Keywords: Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014, Expansion of Pretrial Objects, and Consequences